

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Review Hasil Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Berikut hasil penelitian dari para peneliti terdahulu, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widiatmoko (2017) dengan judul “Determinan Integritas Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Yang Mengikuti Program Corporate Governance Preception Index Tahun 2011-2014)”. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: Indeks persepsi tata kelola perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Independensi tidak signifikan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Julia (2017) dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Sub Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 dan diperoleh sampel sebanyak 37 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis dari penelitian ini adalah regresi data panel menggunakan aplikasi eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional

dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan secara parsial masing-masing variabel komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zendra (2017) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kesulitan Keuangan/ *Financial Distress*, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Jasa Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014”. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 21 *for windows*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan, *financial distress*, komite audit dan kepemilikan institusional mempengaruhi integritas laporan keuangan. Sedangkan variabel kepemilikan manajerial dihilangkan dari pemrosesan data karena menunjukkan nilai konstan. Variabel proporsi dewan independen tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ida (2013) dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap Integritas Laporan Keuangan”. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance*, yaitu komisaris independen, komite audit berpengaruh positif dan signifikan, namun kepemilikan institusional tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh N. P. Yani (2014) dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Dewan Direksi Terhadap Integritas Laporan Keuangan”. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Variabel kepemilikan institusional dan dewan direksi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sementara variabel kepemilikan

manajemen, komite audit serta komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Salami (2014) dengan judul “*Coporate Governance Mechanisms and Accounting Conservatism*”. Variabel independen yang digunakan adalah *CEO duallity, board size, board composition* dan *director ownership*. Kemudian variabel kontrol yang digunakan adalah *leverage, firm size and beverages sector*. Sampel yang digunakan adalah *Corporations of Nigeria food and beverages sector* serta menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *board composition* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *accounting conservatism*. Sedangkan *CEO duality, board size, director ownerships, firm size* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *accounting conservatism*.
7. Penelitian yang dilakukan oleh I Made (2015) dengan judul “*The Charasteristics Board Of Directors, Family Ownership and Accounting Conservatism : Evidence from Family Public Firm in Indonesia* ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *independent director* terhadap *accounting conservatism*. Sedangkan *committee audit* memiliki hubungan positif terhadap *accounting conservatism*. Kemudian *family ownership* melemahkan hubungan antara *independent director* terhadap *accounting conservatism*, namun tidak melemahkan atau memperkuat hubungan antara *committe audit* dan *accounting coservatism*.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Khaddafi (2018) dengan judul “*Effect of Corporate Governance Mechanism, Independence And Management On Earnings Integrity Of Financial Statements*”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme corporate governance yang dianalisis dengan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, independensi dan manajemen laba. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah integritas laporan keuangan yang dianalisis dengan konservatisme. Sampel yang diperoleh menggunakan metode purposive

sampling. Data penelitian dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Adapun kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, independensi dan manajemen laba secara signifikan mempengaruhi integritas laporan keuangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency Theory atau yang biasa disebut teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Menurut Jensen dan Meckling (1976:309) dalam Ocktavia (2013:2) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan yang didalamnya terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang lebih dikenal dengan konflik keagenan. Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yang dikemukakan M. Eisenhardt (1989:58,63) yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa yang akan datang (*bounded rationality*) dan manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*).

Ocktavia (2013:3) menyatakan konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki banyak kepentingan dapat mempersulit dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif untuk menghasilkan nilai yang berguna bagi perusahaan itu sendiri. Selain itu, adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi dapat memicu munculnya suatu kondisi yang disebut dengan asimetri informasi (*information asymmetry*). Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik perbedaan kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat

membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki. Sedangkan agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi, bonus, insentif yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Principal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Semakin tinggi laba, harga saham dan semakin besar dividen, maka agen dianggap berhasil berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif tinggi. Agen memenuhi tuntutan principal untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi, sehingga agen dapat melakukan kecurangan akuntansi.

Lafond dan Watts (2006) dalam Andreas (2017:4) berpendapat bahwa laporan yang mengaplikasikan prinsip konservatisme dapat mengurangi kemungkinan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan serta biaya agensi yang muncul akibat dari asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan kondisi bahwa manajemen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan investor. Salah satu penyebab terjadinya manipulasi laporan keuangan adalah terjadinya asimetri informasi dalam teori agensi. Kasus manipulasi yang paling sering terjadi dalam teori keagenan adalah pencatatan laba yang tinggi. Latar belakang yang menyebabkan perilaku ini adalah adanya insentif manajemen berupa bonus yang diukur dari kerja manajemen dalam mencapai laba, serta menjadi perhatian penting bagi calon investor dalam melakukan pertimbangan pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan manajer bertindak untuk memilih metode akuntansi yang mampu memanipulasi laporan keuangan. Dengan menerapkan perilaku konservatisme dapat mencegah manajer melakukan manipulasi laporan keuangan.

2.2.2 Teori Konservatisme (*Conservatism Theory*)

Enni (2016:20-21) mengatakan konservatisme diterapkan karena akuntansi menggunakan dasar akrual dalam membentuk dan menyajikan suatu laporan keuangan perusahaan. Akrual menyebabkan pembentukan nilai akuntansi tidak hanya sekedar nilai riil dari transaksi keuangan, baik yang mengalir masuk dan keluar namun juga menyertakan suatu pencatatan mengenai nilai dari transaksi yang menimbulkan kemungkinan dari masuk dan keluarnya uang di masa mendatang, baik yang disebabkan oleh transaksi dimasa lalu dan di masa sekarang. Dalam kaitan ketidakpastian di masa mendatang inilah kemudian akuntan menerapkan konservatisme yang mengantisipasi ketidakpastian aliran uang masuk dan keluar di masa mendatang karena penggunaan dasar akrual di dalam akuntansi.

Definisi resmi dari konservatisme terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (*Financial Accounting Statement Board*) yang mengartikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan.

Watts (2003) dalam Enni (2016) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aset dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Reyad (2012) mengatakan bahwa secara umum konsep akuntansi konservatif berarti perusahaan harus melaporkan minimum nilai aset dan pendapatan, namun disisi lain memaksimalkan nilai dari kewajiban dan biaya. Konservatisme dalam pelaporan keuangan adalah bukan mengantisipasi laba tetapi mengantisipasi semua kerugian, perubahan pola kompensasi, risiko, dan standar akuntansi dapat meningkatkan tingkat konservatisme dengan menunda pengakuan laba. Konservatisme menyatakan hasil yang baik dari perusahaan dalam

meningkatkan kredibilitas akuntansi dan kemampuan untuk memprediksi masa depan.

Enni (2016:38) menyatakan konservatisme yang berusaha untuk memverifikasi hal-hal yang mengakibatkan kerugian (*loss*) lebih cepat dibandingkan yang menghasilkan keuntungan (*gain*) dilakukan karena beberapa alasan. Alasan-alasannya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Hendriksen (1982), bahwa konservatisme dilakukan karena 1) kecenderungan untuk bersikap pesimis dianggap perlu untuk mengimbangi optimisme yang mungkin berlebihan dari para manajer dan pemilik sehingga kecenderungan melebih-lebihkan dalam pelaporan relatif dapat dikurangi; 2) laba dan penilaian yang dinyatakan terlalu tinggi (*overstatement*) lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada penyajian yang bersifat kerendahan (*understatement*) dikarenakan resiko untuk menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melaporkan hal yang tidak benar menjadi lebih besar; 3) akuntan kenyataannya lebih mampu memperoleh informasi yang lebih banyak dibandingkan mampu mengkomunikasikan informasi tersebut selengkap mungkin yang dapat dikomunikasikan kepada para investor dan kreditor, sehingga akuntan menghadapi 2 macam risiko yaitu risiko bahwa apa yang dilaporkan ternyata tidak benar dan risiko bahwa apa yang tidak dilaporkan ternyata benar.

Di tengah kontroversi penerapan metode akuntansi konservatif, Reyad (2012) mengatakan bahwa konservatisme mengurangi asimetri informasi dan biaya agensi dengan mengurangi kemampuan manajer dan insentif untuk menggunakan asimetri informasi terkait opsi pertumbuhan untuk memanipulasi laporan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu, tingkat konservatisme dalam laporan keuangan dapat diukur menggunakan *market to book ratio* yaitu Model Beaver dan Ryan. Apabila rasio lebih dari satu, perusahaan diindikasikan menerapkan metode akuntansi konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasarnya.

2.2.3 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi keuangan (SAK) (2017:3), Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Kasmir (2016:7) menjelaskan laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Dalam hal laporan keuangan, sudah merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Kemudian laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan, dengan melihat berbagai persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki.

Menurut Harahap (2015:105) menjelaskan laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau catatan yang menggambarkan situasi dan kondisi keuangan perusahaan itu sendiri dalam satu periode.

2.2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2017:3) adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Hery (2013:7) mengemukakan bahwa tujuan khusus laporan keuangan menurut APB Statement No. 4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Sedangkan tujuan umum laporan keuangan menurut APB Statement No. 4 adalah :

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan.
2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
3. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban.
5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan.

2.2.3.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Agar tujuan laporan keuangan tersebut dapat dicapai, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dinyatakan dalam SAK (2017:5) sebagai berikut :

1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2) Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu.

3) Keandalan

Informasi juga harus (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4) Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.2.3.3 Pemakai Laporan Keuangan

Menurut SAK (2017:2-3) pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda, antara lain :

1. Investor

Penanam modal beresiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada entitas dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan dan atau tergantung pada entitas.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas. Mereka juga membutuhkan informasi untuk aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang diperkirakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.2.4 Pengertian Audit

Menurut Arens (2015:2) mendefinisikan auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Mulyadi (2014:9) mendefinisikan bahwa auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Agoes (2012:4) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

Berdasarkan definisi audit diatas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses sistematis yang bersifat logis, terstruktur dan terorganisir. Proses sistematis yang dilakukan tersebut merupakan proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang dibuat oleh individu maupun entitas yang kemudian dievaluasi oleh auditor.

2.2.4.1 Tujuan Audit

Menurut Arens (2015:168) tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan audit adalah untuk mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap

laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Menurut Institusi Akuntan Publik Indonesia (2011:110:1) adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat. yatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat.

2.2.5 Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang berintegritas. *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2* menjelaskan bahwa integritas informasi laporan keuangan merupakan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan disajikan secara wajar, tidak bias dan secara jujur menyajikan informasi. Fajaryani dalam Widiatmoko (2017) mendefinisikan bahwa integritas laporan keuangan merupakan penyajian laporan keuangan secara jujur dengan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan sesungguhnya. Dengan demikian, laporan keuangan dituntut untuk disajikan dengan integritas yang tinggi sehingga tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi yang memuat informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Menurut Kieso (2011:88) dalam Zendra (2018:2724), integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau

disembunyikan. Jadi apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas (tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk dituntut semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang tidak berintegritas itu, ternyata laporan keuangan yang *overstate* akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan sebagai media yang menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan baik pihak internal maupun eksternal harus menjunjung tinggi integritas dalam penyajiannya. Saksakotama (2014) mendefinisikan integritas laporan keuangan yaitu sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif terutama relevan dan keandalan. Menjaga integritas dari laporan keuangan menjadi tanggungjawab dua pihak yang terlibat dalam penyajian yaitu manajemen perusahaan sebagai pihak yang menjalankan kegiatan pencatatan dan penyajian laporan keuangan serta akuntan publik selaku pihak eksternal yang mengaudit dan memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan yang di auditnya. Laporan keuangan harus memiliki integritas yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga para pemakai laporan keuangan tidak keliru dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan tanpa ada unsur sengaja untuk merekayasa informasi sehingga menyesatkan para pihak yang berkepentingan.

Integritas laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan konservatisme dan manajemen laba. Dalam penelitian ini pengukuran integritas laporan keuangan menggunakan konservatisme, karena pengukuran dengan konservatisme menyajikan dengan prinsip kehati-hatian, dimana perusahaan tidak terburu-buru untuk mengakui aset dan laba, serta mengakui utang dan kerugian yang memungkinkan akan terjadi. Sehingga menghasilkan laba yang memiliki kualitas yang cukup baik. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan *understate* yang memiliki resiko lebih kecil dibanding laporan keuangan yang *overstate*. Sedangkan pengukuran

menggunakan manajemen laba lebih banyak kasus manipulasinya, yang disebabkan karena manajer menggunakan pertimbangan dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan yang bertujuan untuk memanipulasi besaran laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian yang tergantung pada besaran angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Konservatisme merupakan sebuah prinsip kehati-hatian dalam mengakui aset dan laba oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian. Konsep konservatisme dalam penggunaannya adalah untuk mengakui, mengukur dan melaporkan nilai aset dan pendapatan lebih rendah, dan nilai kewajiban dan beban lebih tinggi (Ida, 2013).

Dalam penelitian ini diukur menggunakan Model Beaver dan Ryan, yaitu tingkat konservatisme dalam laporan keuangan di mana nilai aset *understatement* dan kewajiban *overstatement* dapat diketahui dengan menggunakan *market to book ratio*. *Market to book ratio* yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1 mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya. Rasio harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya mengindikasikan pandangan investor atas perusahaan. Perusahaan yang dipandang investor baik dengan memiliki laba dan arus kas aman dan mengalami pertumbuhan terus menerus dijual dengan rasio nilai buku yang lebih tinggi dibanding perusahaan dengan tingkat pengembalian yang rendah. Rasio *market to book value* yang bernilai lebih dari 1 yang berarti bahwa investor bersedia membayar saham lebih besar dari nilai buku akuntansinya terjadi terutama karena nilai aset yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan tidak mencerminkan baik itu inflasi maupun *goodwill*. Aset yang telah dibeli beberapa tahun yang lalu dicatat berdasarkan harga perolehan awal meskipun inflasi telah menyebabkan nilai aset mengalami kenaikan signifikan. Selain itu, kelangsungan usaha yang

berhasil juga menyebabkan nilai aset yang sebenarnya naik secara signifikan (Brigham dan Houston, 2012: 151-152).

$$CONS = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$

Keterangan :

CONS : Konservatif untuk mengukur integritas laporan keuangan.

Nilai Buku Saham: Total Ekuitas/Jumlah Saham Beredar.

2.2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan

Faktor-faktor integritas laporan keuangan yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi komite audit, ukuran perusahaan dan *leverage*. Faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.6.1 Komite Audit

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: PER-12/MBU/2012 , berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam rangka membantu dewan komisaris/dewan pengawas BUMN dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan pengawasan yang efektif, dewan komisaris/dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit. Dewan Komisaris dalam pasal 1 adalah organ perusahaan perseroan (persero) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Dewan Pengawas dalam pasal 1 adalah organ perusahaan umum (perum) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perum.

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian tugasnya adalah

membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, Pasal 1 angka 1, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Pasal 2, Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Pasal 4, Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Pasal 10, dalam menjalankan fungsinya komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan public kepada public dan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan public;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;

- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Kalbers & Fogarty (1993) dalam Mumpuni (2011) menyebutkan tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya yaitu :

- a. Kewenangan formal dan tertulis;
- b. Kerjasama manajemen; dan
- c. Kualitas/kompetensi anggota komite audit.

Pasal 11, dalam melaksanakan tugasnya, komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

2.2.6.2 Ukuran Perusahaan

Fajaryani (2015) dalam Zendra (2017:2722) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan karena semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam. Semakin besar penjualan, maka semakin besar

pula perputaran uang dalam perusahaan tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat.

Menurut Febrianty (2011) ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara, antara lain dinyatakan dalam total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan diartikan sebagai skala menentukan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditentukan berdasarkan ukuran seperti, jumlah kekayaan dan total penjualan perusahaan dalam satu periode penjualan, jumlah kepemilikan aset suatu perusahaan, dan lain-lain. Pada penelitian ini akan menggunakan total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai suatu skala menentukan ukuran perusahaan. Penjualan adalah salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Brigham & Houston (2012) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln Total Penjualan}$$

UU No. 20 Tahun 2008 mengategorikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. 15 UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Keputusan dari Ketua Bapepam No. KEP.11/PM/1997 menyatakan bahwa perusahaan kecil dan menengah berdasarkan asset atau kekayaan adalah badan hukum yang memiliki total asset tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang memiliki total asset diatas seratus milyar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008 Pasal 6 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	> 300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	2,5 M – 10 M
Usaha Besar	> 50 M

Sumber : UU No.20 tahun 2008

Ukuran perusahaan juga merupakan fungsi dari kecepatan penyampaian laporan keuangan, sebab semakin besar sebuah perusahaan akan semakin cepat menyampaikan laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan, karena perusahaan besar lebih banyak memiliki sumber informasi dan sumber daya untuk membayar audit fee yang relatif tinggi.

2.2.6.3 Leverage

Kasmir (2016:151) mengatakan rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan kan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.

Menurut Kasmir (2014:153) beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aset.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* menurut Kasmir (2014:154) yaitu:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

Subramayam dan Wild (2013:266) mengatakan bahwa salah satu alasan keuntungan utang adalah sifat bunga yang dapat mengurangi pajak, karena beban bunga tersebut akan mengurangi laba sehingga juga akan mempengaruhi perhitungan dan pembayaran pajak.

Anggraini (2015:33) mengatakan dalam menjalankan operasinya, perusahaan memiliki kebutuhan akan dana baik dana jangka pendek maupun dana jangka panjang agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana tersebut juga dibutuhkan untuk melakukan ekspansi usaha atau investasi baru. Artinya di dalam perusahaan harus tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia pada saat dibutuhkan. Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio *leverage* dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Rasio *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Debt to Assets Ratio* (DAR).

Menurut Kasmir (2015:156) *Debt to Assets Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap

pengelolaan aset. Dengan kata lain seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasio rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Rumus untuk menghitung DAR yaitu:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

Peneliti mengidentifikasi hubungan antar variabel pada penelitian ini dengan tiga variabel independen antara lain: Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* dianggap mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan.

Pertama, mengidentifikasikan hubungan antara Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite audit adalah mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal. Komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk

melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang mempengaruhi integritas laporan keuangan (Zendra, 2017).

Kedua, mengidentifikasi hubungan antara Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan. Nasution (2007) dalam Widiatmoko (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berperan penting dalam penyajian laporan keuangan yang berintegritas. Semakin besar suatu perusahaan, maka biaya yang dikeluarkan semakin tinggi. Perusahaan yang besar akan mengungkapkan informasi secara jujur sehingga mencerminkan laporan keuangan integritas yang tinggi guna mewujudkan akuntabilitas publik.

Ketiga, mengidentifikasi hubungan antara *Leverage* terhadap Integritas Laporan Keuangan. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban lebih untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas dibandingkan perusahaan dengan *Leverage* yang rendah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghilangkan keraguan para pemegang saham terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan akan mendorong manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih luas sehingga integritas laporan keuangan semakin meningkat (Fajaryani, 2015).

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih (Sujarweni, 2015). Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Peraturan OJK 55/PJOK.04/2015 Pasal 1 angka 1, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit harus memiliki sifat independensi yang kuat sehingga mampu

mengawasi tindakan manajemen dengan efektif dan memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan operasional sesuai peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku. Sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen memiliki integritas yang tinggi dan tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi pemakainya.

Widiatmoko (2017) dalam hal pelaporan keuangan, komite audit bertugas memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijakan keuangan yang berlaku telah terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah telah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholder dan pengungkapan semua informasi yang dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan. Dengan demikian, komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi manipulasi dalam penyajian informasi akuntansi sehingga keintegritasan laporan keuangan dapat meningkat.

Hasil penelitian Zendra (2017) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan penelitian Julia (2017) memperoleh hasil komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah:

H_1 : Komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Ukuran perusahaan memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan dengan integritas yang lemah. Ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena semakin besar ukuran

perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak dan perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Berbeda dengan perusahaan kecil yang cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan maka integritas laporan keuangan akan semakin meningkat.

Hasil penelitian Ida (2013) dan Anggi (2015) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah:

H₂ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kasmir (2016:151) mengatakan rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin tinggi *leverage* semakin tinggi juga kewajiban perusahaan memberikan informasi dalam bentuk penyajian laporan keuangan secara lebih luas, dengan cara ini menghapuskan rasa keraguan kreditor. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan lebih luas dalam memberikan informasi sebagai upaya memikat investor dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang rendah. Perusahaan yang memiliki hutang yang relatif tinggi akan menerapkan akuntansi konservatif agar laba yang disajikan juga relatif rendah. Semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan akan mendorong manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih luas sehingga integritas laporan keuangan semakin meningkat.

Hasil penelitian Ida (2013) memperoleh hasil bahwa leverage berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian Fajaryani (2015) yang memperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H₃ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017.

2.4.4 Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap Integritas Laporan Keuangan

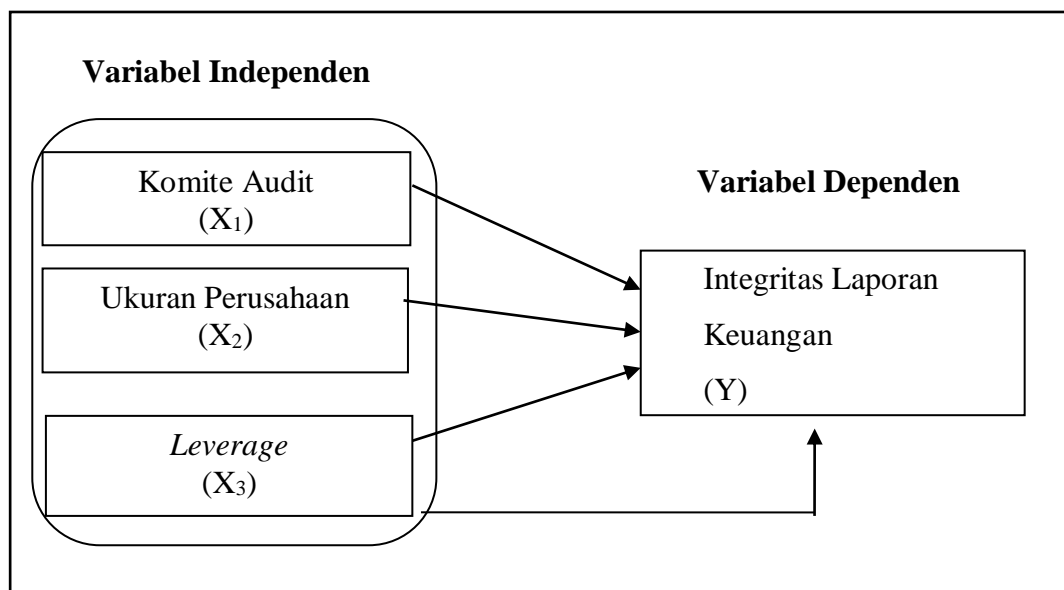
Komite audit bertugas memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijakan keuangan yang berlaku telah terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan yang berlaku. Sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen memiliki integritas yang tinggi dan tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi pemakainya. Semakin besar suatu perusahaan maka modal yang ditanamkan investor akan semakin banyak. Sorotan terhadap perusahaan besar cenderung akan berhati-hati dalam melaporkan laporan keuangannya. Begitu pula dengan perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi juga memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara luas guna menghilangkan keraguan kreditur mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak-haknya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan.

H₄ : Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI. Hal ini membuat penulis menjadikan faktor-faktor tersebut menjadi variabel independen yang akan diteliti hubungannya dengan integritas laporan keuangan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Komite Audit (X_1), Ukuran Perusahaan (X_2) dan *Leverage* (X_3). Sedangkan variabel dependen adalah Integritas Laporan Keuangan (Y). Berikut adalah kerangka konseptual penelitian ini berdasarkan variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Hasil olah peneliti